



Journal of Governance
and Local Politics

ISSN (online) : 2684-9992

JGLP

Journal of Governance and Local Politics

Journal of Governance and Local Politics (JGLP)	Vol. 4	No. 1	Page 001-124	May 2022	ISSN 1684-9992
---	--------	-------	--------------	----------	----------------



JGLP

Journal of Governance and Local Politics

1-11	Konflik Partai Gerindra dan PKS dalam Proses Pengisian Kekosongan Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Dinda Mutia Khaerun Nisa, Sri Budi Eko Wardani
12-21	Reproduksi Kuasa: Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar) Asfar Mutaaly Bareilly, Gustiana A Kambo, Muhammad
22-32	Politik Pencalonan Pasangan Suami-Istri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupaten Lamongan Anang Fajrul Ukhwaluddin, Valina Singka Subekti
33 – 46	Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Ali Ikhwan, Sri Budi Eko Wardani
47 – 54	Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Era New Normal Sadar
56 – 69	The Constraining Dynamics to Promote the Inclusive Village Governance in an Autocratic Leadership Setting Muhammad Taufiq, Rahmad Hidayat
70 – 84	Sinergitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816 Sidoarjo Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Dewi Kurniasih, Aulia Zharifah
85 – 102	Collective Action Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Percepatan Pariwisata Desa Labuan Kertasari untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ilham Zitri
103 – 117	Mengukur Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Rifaid, M. Ulfatul Akbar Jafar, M. Taufik Rachman, Johan Natirius
118 – 124	Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Tradisi Lisan Iko-Iko Suku Bajau Di Sulawesi Tenggara Abdul Hakim

Reproduksi Kuasa: Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar

Asfar Mutaaly Bareilly¹, Gustiana A Kambo², Muhammad³

^{1,2,3} Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
Corresponding Author: mutaaly7@gmail.com

Keyword:
Reproduction of
Power;
Politic of Ethnic
Tionghoa;
Legislative of
Makassar.

Abstract: *This study was conducted to demonstrate understanding the quasi-relationship of the quasi-political reproduction mechanism of ethnic Tionghoa in the 2019 legislative elections in Makassar. The interaction of community groups and ethnic Chinese actors to gain political power through legislative representation in Makassar has not been thoroughly studied. The research method used in this research is qualitative-explorative with a case study approach, where this exploratory study seeks to examine the power relations of the ethnic Tionghoa in the Makassar City legislature. The theory used in this research is "reproduction of power" from Pierre Bourdieu. The results of this study proved that the ethnic Chinese in Makassar City were able to establish power relations effectively. It is proven by the existence of political figures from ethnic Tionghoa who have strategic places in various fields, especially in the Makassar City legislature.*

Kata Kunci:
Reproduksi Kuasa;
Politik Etnis
Tionghoa;
Legislatif Kota
Makassar.

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan memahami relasi kuasa pada mekanisme reproduksi kuasa politik etnis Tionghoa pada pemilu legislatif 2019 di Makassar. Interaksi kelompok masyarakat dan aktor etnis tionghoa untuk mendapatkan kekuasaan politik melalui perwakilan legislatif di Makassar belum mendapatkan telah yang mendalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-eksploratif dengan pendekatan studi kasus, dimana studi eksploratif ini berusaha untuk melihat relasi kuasa etnis Tionghoa di legislative Kota Makassar. teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu "reproduksi kekuasaan" dari Pierre Bourdieu. Hasil penelitian ini terbukti etnis Tionghoa di Kota Makassar mampu menjalin relasi kuasa secara efektif. Terbukti dengan adanya tokoh politik dari etnis Tionghoa mendapat tempat strategis diberbagai bidang khususnya dalam lembaga legislatif Kota Makassar.

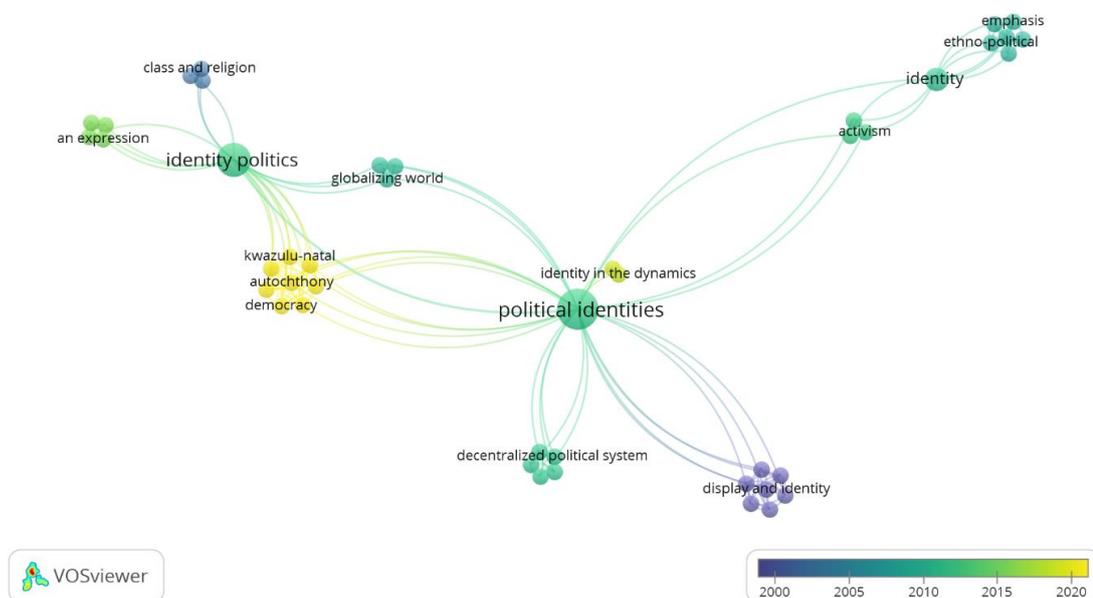
PENDAHULUAN

Perjalanan sejarah yang panjang diskriminasi minoritas etnis Cina Tionghoa di Indonesia (Purbasari & Suharno, 2019; Haboddin, 2012) memberi dampak terhadap perilaku interaksi sosial khususnya kota makassar (Waty, 2016). Kehadiran etnis Tionghoa dalam arena politik kota makassar bukan hal yang baru. Pasca reformasi dengan sistem demokrasi meninggalkan sistem yang sentralistik menuju desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah (Suryadinata, 1984; Rahardjo, 2005; Lukmantoro, 2008; Haboddin, 2012; Rusnaedy, 2020). Demokrasi dicirikan dengan sistem pemilu terbuka dengan mengedepankan kesetaraan dan menjunjung tinggi hak-hak seluruh masyarakat. Efek dari otonomi daerah tentunya ikut merubah kebijakan (Pye & Verba, 2015).

Semenjak reformasi, iklim demokrasi secara nasional telah membuka ruang bagi warga keturunan Tionghoa untuk ikut berpartisipasi dalam hal ini menggunakan hak pilihnya dan terjun langsung dibidang politik, walaupun terkesan pelan dan lambat. Dengan ikut memilih dalam setiap kontestasi politik dan terlibat dipanggung politik menjadikan etnis tionghoa merupakan etnis khusus yang mendapat perhatian dari pihak pemerintah (Suryadinata, 1984; Susetyo, 2002; Trinugraha, 2013). Misalnya dalam pemilihan umum, untuk memilih kepala daerah (Walikota/Bupati) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini memberikan peluang pada etnis Cina Tionghoa untuk bisa mengambil peran yang lebih besar

untuk terlibat melalui pemilihan terbuka pada Pilkada. Kehadiran Etnis Tionghoa dalam arena politik Kota Makassar bukan hal yang baru (Suryadinata, 1984; Susetyo, 2002; Trinugraha, 2013; Warnaen, 2002). Catatan dari pemilu legislatif 2019 Selalu menampilkan wakil dari etnis Tionghoa yang akhirnya terpilih untuk duduk di kursi legislatif (Gatara & Said, 2007; Trinugraha, 2013; Warnaen, 2002).

Pada konteks legislatif makassar pemilih dapil 1 dan dapil 2 kota Makassar sebagian penduduknya berasal dari identitas tionghoa (Hakim, 2019; Fitriani, 2018). Representasi calon dari etnis tionghoa selalu muncul, salah satunya pada pemilu 2019 kehadiran Andre Tanta yang terpilih menjadi anggota DPRD provinsi di daerah pemilihan kota makassar yang menjadi symbol dari kehadiran politik identitas tionghoa di kota Makassar yang maju melalui Partai Nasdem(Fitriani, 2018). Politik identitas secara teoritis adalah politik yang didasari atas kesamaan etnik keberagaman bentuk gerakan sosial dalam masyarakat. Melalui politik identitas, konsolidasi identitas terbangun dan dibangun (Swartz, 2012; Rothschild, 1981; Pye & Verba, 2015). Bagaimana peran kelompok masyarakat dan aktor etnis memaksimalkan kekuasaan dan relasi dapat dijalankan hingga konsolidasi politik identitas itu terjadi. Saluran apa yang digunakan dalam membangun politik identitas di arena pemilihan legislatif kota makassar.



Gambar 1. Identifikasi dan analisis isu penelitian

Sumber: Diolah dari tools VosViewer, 2021

Melihat pada gambar 1 di atas penelusuran penelitian melalui VosViewer interval waktu tahun 2000-2020 menidentifikasi bahwa kecenderungan kasus politik identitas lokal lebih mengarah pada praktek ekspresi kelompok, pertenggaran kelas maupun agama, sampai pada dampak dari globalisasi politik global. Pembangunan politik identitas tersebut, menjadi konsentrasi dari penelitian ini sebagai reproduksi kekuasaan (Bourdieu, 1989). Ada perspektif yang berbeda sebagai peneliti dalam membaca intraksi sosial yang terjadi dalam sebuah kontestasi pemilu yang terlahir dalam sistem Demokrasi, bahwa tindakan konsolidasi tak terlahir begitu saja (Clark, 2018 ;Swartz, 2012; Bourdieu, 1989). Politik identitas awalnya berangkat dari adanya persamaan, seperti persamaan nasib, teritorial dan agama (Bareilly et a., 2021). Dinamika politik di Kota Makassar, apakah para calon hanya memiliki kekuatan finansial serta ruang kebebasan berpolitik yang ditawarkan oleh pemerintah menjadi faktor pemicu yang dianggap sebagai momentum kebangkitan etnis Tionghoa. Apakah keterlibatan mereka secara jauh dalam politik praktis tanpa di didahului peristiwa masa lalu yang mengakibatkan etnis Tionghoa mau

tak mau melakukan konsolidasi politik jangka Panjang (Hakim, 2019). Melalui penelitian ini perlunya dijelaskan secara fakta bahwa konsolidasi politik etnik bisa berkembang dan berdampak sosial di kemudian hari.

Untuk lebih mudah memahami analisis reproduksi kekuasaan untuk menjelaskan relasi kuasa etnis Tionghoa pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Makassar. Bourdieu menyebutnya habitus dalam tiga ciri khas habitus Bourdieu yaitu: (1) habitus mencakup dimensi kognitif dan efektif yang terjawantahkan dalam sistem disposisi; (2) habitus merupakan “struktur-struktur yang di bentuk” (*structured structure*) dan “struktur-struktur yang membentuk” (*structuring structure*); (3) habitus dilihat sebagai produk sejarah (Hapsa & Purnomo, 2016).

Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Bourdieu (1989) tentang reproduksi kekuasaan sebagai pisau analisis dalam menjelaskan fenomena relasi kuasa pada etnis Tionghoa dalam kontestasi Pemilu Legislatif di Kota Makassar 2019. Dimana pada artikel ini mengeksplorasi relasi dari perilaku mekanisme reproduksi kuasa yang melekat pada politik identitas etnis Tionghoa terhadap ranah di dalam posisi lembaga legislative.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif dengan pendekatan fenomenologi (Creswell & Poth, 2016) sebagai eksplorasi fenomena politik identitas etnis Tionghoa dalam mekanisme reproduksi kuasa di legislatif Kota Makassar. Data dan fakta yang digunakan didapat melalui studi pustaka, dengan menelaah, membaca jurnal dan dokumen-dokumen yang relevan sehingga menghasilkan penelitian yang mempunyai. Setelah didapat, data-data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, & Saldana (2014) dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, hingga menghasilkan kesimpulan berupa temuan-temuan baru yang akan berguna bagi pembaca. Kemudian dibantu dengan tools penelitian kualitatif Nvivo 12 Pro (Woolf & Silver, 2017) untuk mengeksplorasi lebih dalam masalah yang terjadi dan mendapatkan kesimpulan terbaik.

HASIL DAN DISKUSI

Habitus Dalam Membentuk Relasi Kuasa Etnis Tionghoa di Legislatif

Relasi kekuasaan diandaikan terbentuk dalam sebuah topografi ruang sosial, maka ruang sosial terdiri dari berbagai ranah yang berbeda dan saling terkait. Perwujudan kekuasaan yang dominan memerlukan perangkat-perangkat simbolik untuk melegitimasi kekuasaan tersebut. Artinya dominasi kekuasaan tidak akan bisa terbentuk tanpa adanya akumulasi modal (modal ekonomi, sosial, kultural, maupun simbolik). Semakin besar volume modal yang dimiliki seseorang atau instansi, semakin besar pula kekuasaan yang diwujudkan. Dengan demikian kekuasaan, sangat dipengaruhi oleh konsepsi ranah (field), persepsi (habitus), kapital, dan praktek sosial (Fashri, 2007; Fashri, 2014).

Terkait dengan relasi kekuasaan terhadap anggota DPRD Kota Makassar dengan politik identitas yang dimiliki, Pierre Bourdieu (1989) menyebutkan kerangka investigatif dan terminologi seperti modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik, serta konsep habitus, ranah (field) atau lokasi, dan kekerasan simbolik untuk mengungkapkan dinamika relasi kuasa dalam kehidupan sosial. Mekanisme membangun reproduksi kekuasaan menurut Sjaaf (2014) beranggapan dalam membangun jaringan kekuasaan, realitas etnik memiliki pengaruh dimana etnisitas merupakan sejarah yang tidak dapat dipungkiri dan memberikan sumbangan terhadap habitus aktor. Hal ini dapat divisualisasikan pada gambar 2 dibawah ini bagaimana eksplorasi fenomena politik identitas etnis Tionghoa dalam mekanisme reproduksi kuasa di legislatif Kota Makassar.



Gambar 2. Studi isu & Masalah Penelitian

Sumber: Diolah dari Nvivo 12 Pro, 2021

Dari hasil observasi langsung dan penyesuaian dengan data, Etnis tionghoa yang ada di Makassar cukup adaptif terhadap dinamika politik yang berkembang. Dilihat dengan banyaknya partisipasi etnis tionghoa yang mendaftarkan diri pada partai politik dan ikut serta dalam kontestasi pemilu legislatif. Gambaran berkembangnya partisipasi politik oleh etnis tionghoa di kota Makassar salah satu yang melatar belakangi adalah bertahannya perolehan kursi etnis tionghoa pada kontestasi legislatif 2009 hingga 2019, perkembangan itu dapat pula di potret pada legislatif 2019 yang dimana bertambahnya jumlah kursi provinsi di wilayah pemilihan kota Makassar yaitu Dapil 1 dan Dapil 2 (Putri, 2013; Juliastutik, 2010).

Tabel 1. Daftar Anggota Legislatif Kota Makassar Etnis Tionghoa/Ada Keturunan Tionghoa

No.	Nama	Dapil	DPRD
1	Romi Arfandi Tandiari (Hanura)	Dapi Makassar I	Kota Makassar
2	Yohanna Massie (PDIP)	Dapi Makassar I	Kota Makassar
3	Alfon Romio Limbunan (PKB)	Dapi Makassar I	Kota Makassar
5	Edwar Horas (Gerindra)	Dapil Makassar I	Kota Makassar
6	Hendriyk Hodiono (Demokrat)	Dapil Makassar II	Kota Makassar
7	William Laurin (PDIP)	Dapil Makassar II	Kota Makassar
8	Melani Simon (NASDEM)	Dapil Makassar II	Kota Makassar
9	Adi Mulyadi (PAN)	Dapil Makassar III	Kota Makassar
10	Ariella Hana Sinjaya (NASDEM)	Dapil Makassar V	Kota Makassar

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2021

Pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pada pemilihan umum (pemilu) 2019 mendatang, seiring beberapa orang Tionghoa yang diusung sebagai calon legislatif akan semakin semarak. Pembagiannya mulai merata, bukan satu partai, tapi hampir semua partai. Juga di tingkat parlemen, tidak hanya DPRD Makassar, tetapi juga DPRD provinsi dan DPR RI. Untuk DPR RI ada Raymond Arfandi. Orang-orang yang berprofesi sebagai pengusaha mencari kursi di DPR melalui Partai Nasdem di Kabupaten I Sulawesi Selatan. Selain itu, Esai Kristoforus berjuang

melalui Perindo dan Irwan Sutanto melalui PDI-P. Daerah pemilihannya meliputi enam kabupaten, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Yeneponto, Banten dan Selaya. Selain itu, untuk DPRD Sulsel juga ada nama James Kairupan (James Kairupan) yang berjuang di daerah pemilihan kedua Sulsel (Gowa dan Takalar) melalui partai Hanura. Ada juga calon Edwar Horas saat ini yang berjuang di Dapil Makassar melalui partai Gerindra. DPRD Makassar punya calon lebih banyak. Hampir di semua dapil. Misalnya, di daerah pemilihan pertama, Partai Kebangkitan Bangsa memiliki petahana Erick Horas (Gerindra), Romi Arfandi Tandiar (Hanura), Yohanna Massie (PDIP) dan Alfon Romio Limbunan (PKB) (Fitriani, 2018; ANTARANEWS, 2019). Muchlis, 2018).

Dimensi Kongitif dan Efektif Dalam Keseharian Etnis Tionghoa di Kota Makassar

1. Struktural Yang Dibentuk dan Yang Membentuk Pada Habitus Etnis Tionghoa

Proses adaptasi masyarakat Tionghoa di Kota Makassar merupakan proses adaptasi dengan melalui interaksi sosial dengan masyarakat dan lahirnya pola tingkah laku etnis Tionghoa yang mengikat norma sosial, cara masyarakat etnis Tionghoa mempertahankan kebudayaan di kota Makassar yakni melakukan event-event tentang Tionghoa dan melaksanakan kegiatan tang berhubungan dengan tradisi orang-orang Tionghoa, akulturasi budaya etnis Tionghoa dengan budaya Makassar perkawinan antara etnis Tionghoa dengan etnis Makassar dan makanan tradisional. Inilah yang menjadikan masyarakat etnis Tionghoa tetap eksis di kota Makassar dan mempertahankan kebudayaannya (Darwis, 2013).

Sehingga dari bentuk-bentuk nilai tersebut yang mengakar di kehidupan etnis Tionghoa, mampu menciptakan prinsip penggerak dan pengatur praktik-praktik hidup dan representasi-representasi, yang dapat disesuaikan dengan tujuan-tujuan tanpa mengabaikan pengarahannya secara sadar dan penguasaan secara sengaja untuk pencapaian-pencapaian tertentu dalam sebuah arena sosial. Etnis Tionghoa mampu membentuk struktur yang kuat terhadap disposisi masyarakat umum atau etnis lain. Kota Makassar sendiri yang memiliki masyarakat beragam dan majemuk, dimana etnis Bugis menghadirkan habitus yang berupa hasil keterampilan dan tindakan praktis yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah kemampuan yang kelihatan melekat pada etnis Tionghoa tersebut. Dengan adanya Edwar Horas di Legislatif DPRD Kota Makassar, menunjukkan bahwa posisi Etnis Tionghoa ada pencapaian-pencapaian eksistensi sosial di lingkungan masyarakat Kota Makassar, yang saat ini tidak bisa terbantahkan.

2. Kemunduran Nilai-Nilai Terhadap Struktur Yang Dibentuk

Degradasi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada tatanan sosial tidak dapat dihindari. Perkembangan zaman, kemajuan IPTEK serta keadaan lingkungan serta perubahan kondisi alam mengakibatkan bergesernya pula nilai-nilai budaya yang selama ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Tionghoa yang berdomisili di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Beberapa generasi sekarang ini mengalami kemunduran dalam pemahaman moral, karakter dan tingkah laku serta daya kreatifitas. Terbukti dengan maraknya berbagai kasus yang terjadi, salah satu pergeseran nilai yang dominan terjadi pada kalangan etnis Tionghoa di Makassar yaitu menurut Waty (2019) berjalannya waktu dari masa ke masa pergeseran nilai diskriminasi yang melekat pada Etnis tionghoa menjadi motivasi orientasi etnis di Kota Makassar.

Selanjutnya, penurunan nilai tersebut juga bisa dicermati dari pola hidup etnis Tionghoa di Makassar dengan melihat kelas sosialnya, dimana tidak jarang dijumpai orang Tionghoa yang hanya cenderung individu-inklusif dengan etnis yang ada di Kota Makassar sehingga berdampak kepada diskriminasi dan termarginalkan. Menurut Darwis (2013) Konflik sosial etnik Tionghoa di Kota Makassar tersebut mengakibatkan kerusakan properti milik etnik Tionghoa. Tulisan ini mengetengahkan pandangan tentang perilaku sosial budaya etnik Tionghoa yang rentan memicu konflik. Dengan demikian, beberapa perilaku tersebut patut dicermati untuk mendorong terciptanya integrasi budaya etnik Tionghoa dengan etnik pribumi di Kota Makassar.

Masalah interkasi warga keturunan Tionghoa dengan warga pribumi di Kota Makassar yang berlangsung saat ini merupakan salah satu aspek yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan tujuan dan motif hubungan yang tercipta antara dua etnis tersebut. Maka Motif atau tujuan ini tidak perlu dikemukakan secara sadar, jadi

tidak perlu interksi sosial tidak perlu di paksakan secara kewajib sosial dalam lingkungan masyarakat Kota Makassar (Darwis, 2013).

Ada juga kebiasaan orang kaya seperti cairnya dinamika politik yang terjadi di kota Makassar juga di sebabkan oleh tingginya pembicaraan akan politik uang di tingkat RT /RW hal ini terkonfirmasi pada lembaga survei LIPI pada kontestasi pemilu legislatif 2019 yang disampaikan media Kompas, Djayadi Hanan yang merupakan Direktur Eksekutif yang menyatakan uang menjadi suatu yang tidak menjadi masalah bagi masyarakat pada pemilihan calon legislatif, di situasi berbeda Proses kandidasi parpol yang cenderung sentralistik tentunya menjadi tantangan pada internal rekrutment di tubuh partai (Wirawan, 2019). Money politik yang menjadi hal yang dianggap bukan masalah dalam kontestasi pemilu menjadi celah untuk merebut suara sebanyak-banyaknya melalui pembelian suara pada tingkat menengah kebawah dalam masyarakat (Muhtadi, 2013).

3. Ranah dalam Relasi Kuasa Identitas Etnis di Lembaga Legislatif

Inklusivitas budaya etnis Tionghoa ditandai dengan adanya kecendrungan masyarakat Tionghoa untuk menciptakan lingkungannya sendiri. Hidup secara eksklusif dan tetap mempertahankan adat kebiasaan (Kebudayaan) dari terdisi leluhurnya. Karena adanya perbedaan tersebut maka terciptanya jarak atau pembatas yang menyebabkan tidak terjadinya hubungan sosial yang harmonis dan menyebabkan putusnya hubungan komunikasi dengan etnis lainnya yang bermukim bersama di Kota Makassar (Darwis, 2013).

Menurut Darwis (2013) masalah ini perlu di selesaikan dengan komunikasi yang baik karena adanya komunikasi yang baik dan langsung maupun tidak langsung akan dapat menciptakan suatu saling mengerti antara etnis juga dapat menjauhkan kedua etnis dari berbagai masalah/bencana yang dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Ranah yang merupakan arena kekuatan yang didalmnya terdapat upaya-upaya dan strategi untuk memperebutkan modal sosial, yaitu kedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Serta upaya untuk memperoleh serta mempertahankan akses dengan hirarki kekuasaan di Kota Makassar (Prianto et al., 2021). Ranah yang merupakan arena perebutan kekuasaan, mempertahankan atau mengubah konfigurasi kekuasaan yang ada di Makassar menuju keuntungan kelas sosial yang akan diperoleh. Struktur ranah yang ada baik ranah dalam kedudukan (posisi), ranah sebagai arena kekuatan (Forces), dan ranah strategi dimiliki oleh etnis Tionghoa yang akan menentukan pencapaian-pencapaian tersebut baik individu maupun kelompok etnis Tionghoa. Sehingga etnis Tionghoa mau tidak mau melakukan interasi social-ekonomi politik dengan masyarakat bugis di Kota Makassar secara damai dan bersahabat.

Habitus yang mendasari terbentuknya ranah, pengakuan terhadap fenomena kolektif yang ada pada kelompok etnis Bugis di Kota Makassar dalam berinteraksi dalam memahami dunia sosial untuk melangsungkan perannya sebagai makhluk sosial yang memiliki nilai-nilai dan karakter budaya khas. Dimana karkter yang melekat pada masyarakat etnis Tionghoa yang disepakati yaitu Karakter dengan pribadi yang cendrung tahan banting, pekerja keras, etos kerja yang tinggi serta memiliki kedudukan kelas sosial diatas rata-rata, yang mampu menguasai pasar kebutuhan bangunan dan elektronik di Kota Makassar. Perilaku ini Sehingga memperoleh kesepakatan bersama terhadap karakter atau habitus yang tidak lepas dari pengaruh epistemologi sejarah dalam arti mengungkap relevansi parktis pada dinamika zamannya.

Saat ini ranah yang dihadapi pada kelompok etnis Tionghoa di Kota Makassar yang fokusnya pada masyarakat Bugis yang terlibat dan pelaku dalam memperoleh posisi-posisi didalam lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar membangun hubungan saling menguntungkan, Ini menghadirkan berbagai macam potensi yang ada, baik oleh individu maupun kelompok sesuai porsinya masing-masing (Muchlis, 2018; Fitriani, 2018).

Bentuk & Dampak Relasi Sosial Etnis Tionghoa dalam Lingkungan Sosial Saat Pemilu Legislatif di Kota Makassar

Kekuatan ekonomi etnik Tionghoa merupakan ujung tombak keberhasilan aktor politiknya melanggengkan kuasa dalam kontestasi pemilihan legislatif, tercatat dari pemilihan legislative 2014 dan 2019 memiliki beberapa legislative etnik tionghoa di DPRD Kota Makassar yang Incamben seberpti adanya Edwar Horas di Legislatif DPRD Kota Makassar. Dalam Kontektasi Politik menjadi rahasia umum dalam eksploitasi sumber daya untuk mendapatkan kursi DPRD salah satunya adalah pemanfaatan pegawai pada unit usaha yang dimiliki untuk di manfaatkan dan merupakan alternatif yang di anggap produktif dalam memobilisasi produk-produk kepentingan dalam meraup suara pada saat kampanye-kampanye kemasyarakat. Keterikatan sebagai pegawai di perusahaan Etnis menjadi dilematis terhadap situasi lapangan pekerjaan yang di miliki. Secara rasional populasi etnis cina tionghoa setiap daerah pemilihan (dapil) di kota Makassar jumlahnya berbeda beda, tentunya tidak cukup hanya dengan mengkampanyekan program sesame Etnis .

Pada bagian ini untuk melihat bentuk relasi sosial yang di lakukan etnis Tionghoa di lingkungan sosial di Kota Makassar sebagai gerakan politik pemilu legislative di Kota Makassar dapat kita lihat melalui 4 pendekatan (Idi, 2018; Prianto et al., 2021) berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), akomodasi (*accommodation*) dan asimilasi (*assimilation*). Sebagaimana berikut ini:

Tabel 2. Interaksi Sosial Etnis Tionghoa di Lingkungan Sosial sebagai gerakan politik pada Pemilu Legislatif Kota Makassar

No.	Pendekatan	Bentuk Interaksi Sosial
1	Kerjasama (<i>cooperation</i>) etnik Tionghoa di Kota Makassar	Kerja Bakti dengan ikut turun langsung kerjasama, menyalurkan bantuan berupa makanan dan air dos, pada tiap kerja bakti yang di lakukan di tiap RT, Kelurahan di Lingkungan Kota Makassar.
2	Persaingan (<i>competition</i>) etnik Tionghoa di Kota Makassar	Bentuk persaingan yaitu Persaingan ekonomi, seperti sebagian toko-toko bengkel yang ada di Kota Makassar di Miliki oleh Etnis Tionghoa.
3	Akomondasi (<i>accommodation</i>) etnik Tionghoa di Kota Makassar	Menjaga Silaturahmi dengan etnis-etnis lain yang ada di Kota Makassar. dalam bentuk silaturahmi pada acara acara hari raya seperti lebaran dan Imlek.
4	Asimilasi (<i>assimilation</i>) etnik Tionghoa di Kota Makassar	Warga Tionghoa yang ada di Kota Makassar sebaga besar sudah mengerti dan paham dengan Bahasa Makassar.

Sumber: Diolah dari berbagai Sumber, 2021

Pada table 2 di atas bisa dikatakan bahwa stereotipe di akan kepemilikan kapital yang di miliki para aktor etnis menjadi sebuah paradigma di masyarakat bahwa alasan keberanian maju aktor etnis dalam kontestasi pemilu, salah satu aktor etnis tionghoa Erik Horas yang memiliki banyak bisnis yang di miliki keluarganya hal ini memberikan perspektif yang menarik untuk di telaah terkait alasan maju menjadi anggota DPRD Kota Makassar yang dimana dilakukan bersama saudaranya yang maju juga dalam kontestasi Pileg (pemilu legislatif) provinsi (Pattisahusiwa, 2019). Selain mencoba membangun relasi sosial seperti: (1) Melakukan Kerja Bakti dengan ikut turun langsung kerjasama, menyalurkan bantuan berupa makanan dan air dos, pada tiap kerja

bakti yang di lakukan di tiap RT, Kelurahan di Lingkungan Kota Makassar; dan (2) Menjalin Silaturahmi dengan etnis-etnis lain yang ada di Kota Makassar. Dalam bentuk silaturahmi pada acara acara hari raya seperti lebaran dan Imlek. Memanfaatkan Sumber daya uang dan jaringan etnis Tionghoa yang di miliki menjadi faktor penting aktor politik etnis Tionghoa dalam memenangkan Pemilihan Legislatif di Kota Makassar.

Dalam penelitian ini kami menyimpulkan bahwa Politik Etnis Tionghoa di Kota Makassar mampu menjalin relasi kuasa secara efektif. Terbukti dengan adanya tokoh politik dari etnis Tionghoa mendapat tempat startegis diberbagai bidang khususnya dalam lembaga legislatif Kota Makassar.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini secara sederhana kami menyimpulkan bahwa politik etnis Tionghoa di Kota Makassar mampu menjalin relasi kuasa dengan secara efektif. Terbukti dengan adanya tokoh politik dari etnis tionghoa mendapat tempat startegis diberbagai bidang khususnya dalam lembaga legislatif Kota Makassar. Relasi kuasa identitas etnis pada lembaga legislatif Kota Makasar sangat sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Pierre Bourdieu dalam mekanisme reproduksi kekuasaan. Prinsip habitus dalam membentuk relasi-relasi membuat etnis Tionghoa mampu memiliki kuasa dalam lembaga legislatif terbukti dengan kedudukan dan perannya dalam kursi legislatif pada 2019-2024 sebesar 28,89% (13 kursi). Habitus yang terikat dalam ruang dan waktu serta kondisi material yang mengelilinginya, proses akumulasi prilaku yang terjadi tidak terlepas dari awal kedatangan periode pertama pada abad ke17, yang dilakukan oleh leluhur masyarakat etnis Tionghoa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami berterimakasih kepada tim Right Indonesia telah membantu penulis menyelesaikan artikel ini, baik membantu penulis dalam menyediakan data penelitin sampai diskusi dalam mengeksplor teori dan menganalisis masalah penelitian ini.

REFERENSI

- ANTARANEWS. (2019). Wajah Baru Dominasi Anggota DPRD Makassar Terpilih. Available at <https://www.antaraneWS.com/berita/872726/wajah-baru-dominasi-anggota-dprd-makassar-terpilih#mobile-src> accessed on November 2021
- Bourdieu, P. (1989). Social space and symbolic power. *Sociological theory*, 7(1), 14-25. <https://doi.org/10.2307/202060>
- Clark, T. N. (2018). *The New Political Culture*. Routledge.
- Bareilly, A. M., Muhammad, M., Kambo, G. A., & Abdillah, A. (2021). The Political Identity of Ethnicity in the Local Election of Makassar City 2018. *Journal of Governance*, 6(2), 272-284 <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v6i2.12719>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Darwis, H. D. (2013). Budaya Tionghoa Di Makassar, Cross Culture Yang Belum Tuntas. *SOCIUS: Jurnal Sosiologi*, 13(1), 39-43. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/socius/article/view/395>
- Fashri, F. (2007). Penyingkapan Kuasa Simbol: Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu. *Yogyakarta: Juxtapose*.
- Fashri, F. (2014). Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol. *Yogyakarta: Jalasutra*.
- Fitriani, S. (2018). Pemilu 2019, Tokoh Tionghoa Ramai Perebutkan Kursi Legislatif. [online] available at <https://fajar.co.id/2018/10/20/pemilu-2019-tokoh-tionghoa-ramai-perebutkan-kursi-legislatif/> accessed on October 2021
- Fitriani, S. (2018). Pemilu 2019, Tokoh Tionghoa Ramai Perebutkan Kursi Legislatif. Available at <https://fajar.co.id/2018/10/20/pemilu-2019-tokoh-tionghoa-ramai-perebutkan-kursi-legislatif/> accessed on November 2021

- Gatara, S., & Said, M. D. (2007). *Sosiologi Politik: Konsep Dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya politik identitas di ranah lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1). <http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>
- Hakim, E. (2019). Harapan Pedagang Etnis Tionghoa Makassar di Pemilu 2019. [online] available at <https://www.liputan6.com/regional/read/3935978/harapan-pedagang-etnis-tionghoa-makassar-di-pemilu-2019> accessed on October 2021
- Hapsa, H., & Purnomo, E. P. (2016). Relasi Kuasa Identitas Etnis Dilembaga Legislatif Periode 2014-2019 (Studi Kasus Anggota DPRD Etnis Bugis Dikabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau). *Journal of Governance and Public Policy*, 3(1). <http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2016.0053>
- Idi, A. (2018). *Konflik etno religius di Asia Tenggara*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Irianto, A. M. (2013). Integrasi Nasional Sebagai Penangkal Etnosentrisme Di Indonesia. *Humanika*, 18(2). <https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>.
- Irwan, I. (2018). Masyarakat Tionghoa Di Era Modernisme Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Pena: Sains dan Ilmu Pendidikan*, 10(2), 29-36. <http://ojs.stkippi.ac.id/index.php/jip/article/view/149>
- Juliastutik, J. (2010). Perilaku Elit Politik Etnis Tionghoa Pasca Reformasi. *Jurnal Humanity*, 6(1), 11537. <https://www.neliti.com/publications/11537/perilaku-elit-politik-etnis-tionghoa-pasca-reformasi>
- Lukmantoro, T. (2008). *Kematian Politik Ruang*. Jakarta: Kompas.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.
- Muchlis, A. (2018). Hanya Di Partai Ini Warga Tionghoa Maccaleg di Sulsel Dan Makassar. Available at <https://makassar.tribunnews.com/2018/07/19/hanya-di-pertai-ini-warga-tionghoa-maccaleg-di-sulsel-dan-makassar> accessed on November 2021
- Muhtadi, B. (2013). Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara "Party-ID" dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 17. <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i1.217>
- Pattisahusiwa, D. (2019). Menegenal Sosok Erick Horas Wakil Ketua DPRD Makassar. [online] available at <http://www.inspirasimakassar.com/mengenal-sosok-erick-horas-wakil-ketua-dprd-makassar/> accessed on November 2021
- Prianto, A. L., Malik, I., Rusnaedy, Z., Khaerah, N., Abdillah, A., Lestari, D., & Angraini, A. (2021). Demokrasi Lokal Dan Pemilihan Kepala Daerah Pasangan Calon Tunggal. *Makassar: Subaltern Inti Media*.
- Purbasari, V. A., & Suharno, S. (2019). Interaksi Sosial Etnis Cina-Jawa Kota Surakarta. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 21(1), 1-9. <https://doi.org/10.25077/jantro.v21.n1.p1-9.2019>
- PUTRI, R. H. S. (2013). Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilukada Tahun 2009 (studi Kasus Desa Kragan Kec. Kragan Kab. Rembang). *Paradigma*, 1(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1696>
- Pye, L. W., & Verba, S. (2015). *Political Culture And Political Development*. Princeton University Press.
- Rahardjo, T. (2005). Kebijakan Pemerintah Tentang Etnis Cina. *Dialogue Jiakp*, 2(2), 780-802. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/oai>
- Rothschild, J. (1981). *Ethnopolitics*. Columbia University Press.
- Rusnaedy, Z. (2020). *Dinasti Politik di Aras Lokal*. Penerbit Deepublish.
- Sjaf, S. (2014). *Politik Etnik: Dinamika Lokal di Kendari*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiarti, L. R. (1999). *Interaksi Antar Etnis Ditinjau Dari Sikap Mahasiswa Etnis Jawa Terhadap Etnis Cina Pada Mahasiswa Etnis Jawa* (Doctoral Dissertation, Prodi Psikologi Unika Soegijapranata).
- Sunarto, K. (2005). *Pengantar sosiologi*. Universitas Indonesia Publishing.
- Suryadinata, L. (1984). *Dilema Minoritas Tionghoa*. Grafitipers.

- Susetyo, D. B. (2002). Krisis Identitas Etnis Cina Di Indonesia. *Psikodimensia-Kajian Ilmiah Psikologo*, 2, 61-71. https://www.researchgate.net/profile/D-P-Susetyo/publication/328980214_Krisis_Identitas_Etnis_Cina_di_Indonesia/links/5bee55714585150b2bba1b67/Krisis-Identitas-Etnis-Cina-di-Indonesia.pdf
- Swartz, D. (2012). *Culture and power: The sociology of Pierre Bourdieu*. University of Chicago Press.
- Trinugraha, Y. H. (2013). Politik Identitas Anak Muda Minoritas: Ekspresi Identitas Anak Muda Tionghoa Melalui Dua Organisasi Anak Muda Tionghoa Di Surakarta Pasca Orde Baru. *Jurnal Studi Pemuda*, 2(2), 172-186. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32046>
- Warnaen, S. (2002). *Stereotip Etnis Dalam Masyarakat Multietnis*. Matabangsa.
- Waty, E. G. M. (2016). Orientasi Politik Etnis Tionghoa Di Kota Makassar. *Universitas Hasanuddin*.
- Wirawan, J. (2019). Pemilu 2019: Pileg Dibayangi Pilpres, 'kami tenggelam'. [online] available at <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47688451> accessed on November 2021
- Woolf, N. H., & Silver, C. (2017). *Qualitative Analysis Using Nvivo: The Five-Level Qda® Method*. Routledge.
- Waty, E. G. M. (2016). Orientasi Politik Etnis Tionghoa Di Kota Makassar. *Universitas Hasanuddin*.